



# Wagub Target Raih Predikat WTP

## ■ Minta SKPD Dukung Audit BPK

PONTIANAK, TRIBUN - Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalbar mendukung audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar tahun 2014 yang akan dilakukan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar. Proses audit dimulai 10

**"Kita sangat berharap hasil audit nanti tidak ada temuan dari BPK sehingga Pemprov Kalbar bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)."**  
**CHRISTIANDY SANJAYA**  
 Wakil Gubernur Kalbar

Februari hingga 15 Maret mendatang.

"Pihak BPK sudah datang ke Pemprov untuk mulai mengaudit APBD 2014. Ini artinya seluruh SKPD harus mendukung dalam memberikan informasi yang benar dan apa yang dibutuhkan BPK," ujar Christiandy, Kamis (12/2).

Ia sudah menggelar pertemuan dengan ketua tim BPK. Dalam pertemuan itu, BPK memberikan arahan terkait apa saja yang harus dipersiapkan oleh Pemprov dalam proses audit.

"Kita sangat berharap hasil audit nanti tidak ada temuan dari BPK sehingga Pemprov Kalbar bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya kalau memang ada temuan dan sebagai pasti ada sanksi baik sanksi administrasi atau pidana," ujar Wagub.

Ia menghimbau, seluruh SKPD mendukung proses audit ini. Apapun data dan informasi yang dibutuhkan BPK harus diberikan SKPD. "Sebab ini telah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama," ungkapnya.

Wagub juga meminta SKPD meningkatkan perbaikan administrasi dan

laporan keuangan untuk mempertahankan penilaian WTP.

"Sejak tahun 2013, menjadi awal sejarah baru bagi Pemprov Kalbar dimana kita bisa mendapatkan penilaian WTP dari BPK. Walaupun pada saat itu ada beberapa catatan yang diberikan BPK. Kemudian pada tahun 2014, kembali mendapatkan WTP tentu dengan catatan yang tidak terlalu banyak," katanya.

Setiap SKPD, jelasnya, harus bisa meningkatkan kinerja pegawai administrasi agar bisa memberikan laporan terbaik kepada petugas BPK untuk menghindari adanya kesalahan dari pelaporan yang diberikan.

Dia mengharapkan setiap SKPD bisa mengelola dana yang ada dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya agar tidak ada temuan dari BPK nantinya.

Dia mengimbau agar selama 25 hari ini kepala SKPD mendampingi tim BPK agar semua permasalahan yang ada bisa dikomunikasikan dengan baik pula.

"Tentu kami berharap tidak ada temuan atau catatan yang berarti dari BPK kepada setiap SKPD. Jika ada temuan dan Kalbar pada tahun ini tidak mendapatkan WTP, maka kami akan menelusuri SKPD mana yang menjadi penyebab hal

itu dan tentu akan ada sanksi yang diberikan," katanya.

Christiandy menegaskan, semua Kepala SKPD harus dapat meningkatkan penatausahaan administrasi barang milik daerah yang ada di lingkungan SKPD. Salah satunya seperti pencatatan aset yang tidak lengkap, dengan tidak mencantumkan alamat yang jelas, serta nilai dan luas yang tidak didukung mengenai keberadaan dan keadaan aset yang tersebut.

"Hingga saat ini masih ada terdapat aset pemerintah yang dikuasai pihak ketiga, namun tidak diikuti dengan perjanjian yang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti penguasaan aset daerah kendaraan dan rumah dinas," katanya.

Berdasarkan data yang ada, hingga periode 31 Desember 2013 terdapat 16 SKPD Unit kerja yang memiliki temuan

keuangan dari temuan tahun 2005. Sampai tahun 2012 sebanyak 86 temuan sebesar Rp 83.900.446.549 dan sampai Juni 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 2.158.176.219 sehingga masih tersisa sebesar Rp 81.742.270.330.

"Kemudian, hingga 31 Desember 2014 diharapkan temuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat berkurang sekitar 22 persen menjadi Rp 63.771.865.023 dan diharapkan juga temuan administrasi Inspektorat Provinsi Kalbar hingga 31 Desember 2014 dapat berkurang 11,5 persen atau sebanyak 26 rekomendasi sehingga tersisa 200 temuan. Makanya, sekali lagi saya tegaskan, berikan data dan pemahaman yang jelas kepada petugas pemeriksa BPK, agar tidak ada catatan yang berarti nantinya," kata pungkasnya. (rul/ant)

## Proses Temuan

**WAKIL** Ketua DPRD Kalbar Suma Jenny mendorong Pemprov Kalbar bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Kalbar dalam proses audit.

Apa yang akan dilakukan BPK, katanya, sesuai dengan amanat perundang-undangan, sebab berkenaan dengan administrasi keuangan negara. Proses ini harus mengedepankan azas keadilan dan kepatutan, menyangkut pembelanjaan dan penggunaan yang transparan.

"Kita minta pihak Pemprov mendukung audit yang dilakukan BPK dengan menyiapkan

kan SPJ terhadap keuangan yang telah dibelanjakan. Baik itu belanja pembangunan atau belanja rutin dan sebagainya," ujar politisi Partai Golkar Kalbar ini.

Dukungan Pemprov, katanya, dengan menyiapkan data yang dibutuhkan BPK sehingga proses audit berjalan dengan baik.

"Kita harap tidak ada temuan, kalau memang ada harus diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ungkap anggota dewan Dapil Ketapang dan Kayong Utara ini. (rul)